

**LAPORAN AKHIR MAGANG
KANTOR KONSULTAN PAJAK CORNEL & REKAN**

LAPORAN MAGANG

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

WENDY AINUN WICAKSONO

1119 30865

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
JANUARI 2023**

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

LAPORAN AKHIR MAGANG KANTOR KONSULTAN PAJAK CORNEL & REKAN

Dipersiapkan dan disusun oleh:

WENDY AINUN WICAKSONO

Nomor Induk Mahasiswa: 111930865

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 10 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Deranika Ratna Kristiana. S.E., M.Si., Ak., CA.

Penguji

Efraim Ferdinan Giri, Dr., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 10 Januari 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Laporan ini menjelaskan mengenai kegiatan magang penulis di Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan selama 69 hari terhitung mulai dari 16 september 2022 sampai dengan 5 desember 2022. Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan merupakan kantor jasa konsultan pajak yang melakukan pembukuan di dalam mengelola administrasi perpajakan dan pendampingan untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akuntansi perpajakan digunakan dalam menyusun laporan keuangan fiskal dalam periode tertentu. Dengan adanya jasa konsultan, wajib pajak dapat mengetahui nilai Pajak Penghasilan, Pajak Terutang, Pajak Final, serta Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar atau lebih bayar. Selama magang penulis ditempatkan dibagian akuntan pajak yang membantu para staf, diantaranya yaitu melakukan rekapitulasi rekening koran, menyusun laporan keuangan seperti penyusunan aset, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, pajak terutang, dan neraca; serta menyusun buku besar berdasarkan SPT Masa, melaporkan SPT Masa PPN, dan SPT Masa Unifikasi. Dalam melaksanakan magang tentunya penulis menghadapi beberapa permasalahan dalam pekerjaan, sehingga menghambat dalam menyelesaikannya. Penulis dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana mengatasi masalah ini, serta mendapatkan pengalaman, wawasan, dan keterampilan untuk bekal masa depan.

Kata kunci: Pajak, Magang, Kantor konsultan Pajak. (maksimal 5)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This report describes the author's internship activities at the Cornel & Partners Tax Consulting Office for 69 days starting from September 16, 2022 to December 5, 2022. The Cornel & Partners Tax Consulting Office is a tax consulting service office that performs bookkeeping in managing tax administration and assistance to make payments and report taxes in accordance with applicable laws. Tax accounting is used in preparing fiscal financial reports in a certain period. With the services of a consultant, taxpayers can find out the value of Income Tax, Payable Tax, Final Tax, and Underpaid or Overpaid Value Added Tax. During the internship the author was placed in the tax accountant section which assisted the staff, including recapitulating checking accounts, compiling financial reports such as preparing assets, profit and loss reports, reports on changes in equity, taxes payable, and balance sheets; as well as compiling ledgers based on Periodic SPTs, reporting Periodic VAT SPTs, and Unification Periodic SPTs. In carrying out the internship, of course the author faces several problems in the work, so that it hinders in completing it. Authors can learn more about how to overcome this problem, as well as gain experience, insight, and skills for the future.

Keywords: Tax, Internship, Tax consultant office. (maximum 5)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan di era disrupsi begitu cepat, perubahannya baik tiap detik, menit, jam sangat cepat sekali. Dalam layanan perpajakan pun kini menjadi lebih praktis dan efisien. Banyak kemudahan dalam pelaporan secara elektronik, segala sesuatu tidak perlu lagi menggunakan kertas atau melapor langsung menuju kantor pajak. Saat ini melapor pajak cukup melalui gadget atau laptop yang kita miliki asal tersambung dengan internet, kita dapat melaporkan pajak kapan pun dan dimana pun kita berada (Fatmawati , 2022, p. 6).

Memasuki awal tahun 2020 tepatnya bulan Maret merupakan awal kasus terjadinya COVID-19 di Indonesia. Tentunya dalam hal ini alokasi APBN pemerintah bergeser kepada sektor Kesehatan dan pemerintah pun melonggarkan peraturan perpajakan untuk para pelaku UMKM yang terdampak. (Rahman et al., 2022). Bersamaan dengan hal itu pemerintah telah merancang dan mengesahkan UU No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja dimana dalam hal ini guna mendukung iklim dalam sektor investasi dan penyerapan tenaga kerja (Badan Legislasi, 2020).

Setelah kurang lebih 2 tahun dilanda pandemi, kini perekonomian Indonesia berangsur-angsur mulai menunjukkan pergerakannya. Sebelumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -2,07 persen. (Pratiwi, 2022, p.1). Dalam hal ini tentunya pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dalam pemulihan perekonomian Indonesia. Salah satunya melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dibentuk dengan tujuan untuk

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mendorong agar terciptanya pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan percepatan pemulihan ekonomi, demi mencapai sistem perpajakan yang lebih adil dan legal, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (Firmansyah et al., 2022).

Pelaksanaan dari amanat UU HPP ini mengatur bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia Menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/PMK.03/2022. Tujuan dari kebijakan NIK menjadi NPWP yaitu untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, serta untuk mendukung satu data Indonesia. Hal ini guna mendukung pemerintah dalam mewujudkan Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Pemerintah juga tengah menggenjot pembangunan Ibukota Baru Nusantara (IKN) dimana dalam hal ini kurang lebih pembiayaan pembangunannya 20 persen bersumber dari APBN. Dalam hal ini tentunya pendapatan negara yang bersumber dari pajak harus terus dimaksimalkan demi terwujudnya pembangunan IKN dan pemerataan ekonomi yang tidak hanya berpusat di pulau Jawa saja. (Farisa, 2022, p. 3).

Sebagai warga negara yang baik tentunya kita harus taat membayar pajak, karena pungutannya bersifat wajib dan memaksa. Tentunya dengan membayar pajak, kita turut berkontribusi dalam pembangunan negara. Sesuai dengan bunyi Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, Perpajakan adalah iuran wajib pajak kepada negara, orang pribadi atau badan dipaksakan oleh undang-undang dan tidak mendapat imbalan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

secara langsung. Digunakan untuk keperluan negara guna mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pajak yang kita bayarkan tentunya akan dialokasikan ke dalam belanja pemerintah seperti, pelayanan umum, pertanahan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, perlindungan sosial dan pendidikan sebagai program-program pemerintah yang telah direncanakan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Sedangkan sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment* yang mengharuskan bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pemungutan pajak merupakan kewajiban warga negara sebagai wajib pajak yang mewujudkan peran aktif masyarakat dalam membantu keuangan negara, pelaksanaannya untuk kesejahteraan negara dan bangsa serta diatur dengan undang-undang dan peraturan pemerintah (Waluyo, 2008). Baik itu WP Orang Pribadi maupun WP Badan harus melaporkan kewajiban membayar pajak setiap tahunnya. Sementara itu masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memahami mengenai tata cara pelaporan pajak. Oleh karena itu, untuk menangani hal tersebut dibutuhkan jasa konsultan pajak. Konsultan pajak mempunyai peran ganda dalam sistem perpajakan. Pertama, konsultan pajak merupakan agen kepatuhan pajak. Konsultan menjadi representasi dari pemerintah dalam membangun kepatuhan pajak. Kedua, konsultan pajak adalah agen bagi wajib pajak. Konsultan memiliki peran penting dalam sistem perpajakan ketika otoritas pajak atau pemerintah membuat konsultan pajak menjadi rekan untuk mensupport kualitas dan meningkatkan kepatuhan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pajak. Disisi lain eksistensi konsultan pajak terlihat pada kemampuan memotivasi atau mengajak wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Nugraheni & Sunaningsih, 2020).

Tujuan Magang

Penulis memutuskan untuk melakukan magang, karena magang ini memiliki beberapa tujuan penting. Tujuan penting tersebut adalah untuk:

1. Mengenalkan mahasiswa untuk praktek langsung dalam dunia kerja yang nyata.
2. Melatih kedisiplinan dan tanggungjawab mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaan.
3. Komparasi antara pemahaman teori dan penerapannya, sehingga dapat menjadi bekal mahasiswa dalam dunia kerja setelah lulus.
4. Menambah pengetahuan dan pengalaman di dalam dunia kerja untuk menjadi tenaga kerja yang profesional.
5. Menerapkan mata kuliah seperti Aplikom, Akuntansi Pengantar, dan Perpajakan.

Sistematika Penyusunan Laporan Magang

BAB 1

Merupakan bagian awal dari laporan yang berisi sub-sub bab sebagai berikut:

- 1.1 Latar belakang berisi mengenai topik yang dipilih dalam laporan magang.
- 1.2 Tujuan berisi mengenai tujuan yang diharapkan dari penulisan laporan magang.
- 1.3 Sistematika laporan magang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB 2

Pada bagian ini menjelaskan dan menguraikan tentang profil organisasi dan aktivitas yang dilakukan selama pelaksanaan magang. Bab ini terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

2.1 Profil lengkap perusahaan berisi tentang sejarah awal, struktur kepegawaian organisasi, jenis pelayanan yang diberikan, rencana dan penjadwalan.

2.2 Aktivitas magang

BAB 3

Menjelaskan mengenai hubungan antara teori yang relevan sesuai dengan fakta. Bab ini terdiri dari sub bab berikut:

3.1 Landasan teori yang digunakan di dalam pelaksanaan magang.

BAB 4

Menjelaskan mengenai permasalahan dan pembahasan selama pelaksanaan magang.

Bab ini terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

4.1 Analisis menguraikan masalah yang dialami selama proses pelaksanaan magang.

4.2 Pembahasan berisi mengenai solusi dari permasalahan yang dihadapi selama proses pelaksanaan magang.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB 5

Merupakan bagian akhir dari laporan yang berisi sub-sub bab sebagai berikut:

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Rekomendasi
- 5.3 Refleksi diri



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PROFIL ORGANISASI

Profil Perusahaan

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Cornel & Rekan didirikan oleh Bapak Cornelius Guling, SE., MM., Akt., BKP pada tahun 1998. Kantor tersebut mencakup perusahaan perorangan yang berspesialisasi dalam bidang pajak. Kantor konsultan ini telah memiliki izin praktik perpajakan SI-1774/PJ/2010 dan Register Negara Akuntan D-46, 704.

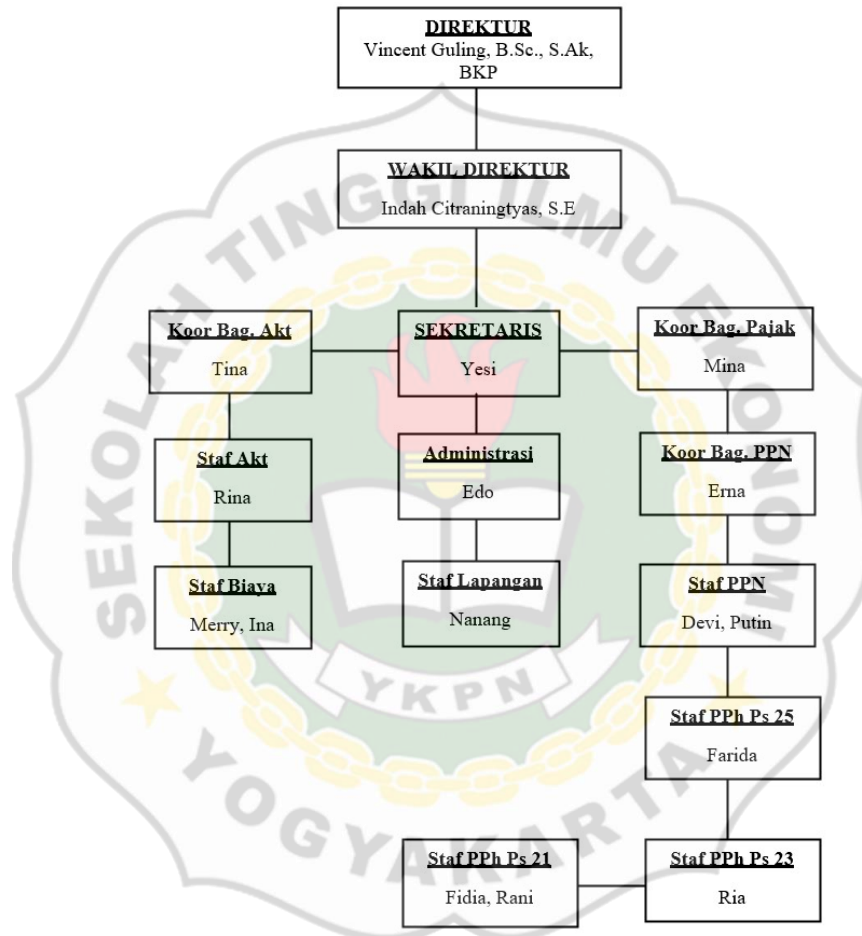
Bapak Cornelius adalah seorang praktisi pajak lulusan USKP yang mampu memberikan jasa konsultasi perpajakan. Cornelius Guling memiliki sertifikat BKP (sertifikasi konsultan pajak) dan lisensi konsultan pajak. Sertifikat BKP diperoleh melalui ujian sertifikasi konsultan pajak yang diadakan oleh KP3SKP (Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak) dan dikeluarkan oleh Administrasi Umum Perpajakan Indonesia.

Pada tahun 2021 terjadi pergantian kepemimpinan selaku direktur Bapak Cornelis Guling meninggal dunia, oleh karena itu selaku direktur kantor konsultan pajak dilanjutkan oleh anaknya. Vincent Guling, B.Sc., S.Ak, BKP merupakan seseorang yang juga lulusan USKP dan menyandang gelar BKP, sehingga dapat melanjutkan bisnis konsultan pajaknya hingga saat ini.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Struktur Organisasi

Struktur organisasi KKP Cornel & Rekan memiliki misi yaitu:



Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan

Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi:

"Menjadi perusahaan penyedia jasa yang profesional, cerdas, dinamis dan mampu bersaing secara Nasional".

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b. Misi:

"Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang efektif dan efisien melalui pengelolaan sistem manajemen yang profesional, sehingga mampu memberikan pelayanan yang berkualitas".

Bidang Layanan Jasa Perusahaan

Bukan hanya tentang pajak Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan juga memiliki layanan jasa lain. Berikut ini penjelasan layanan jasa lainnya:

1. Pajak
 - a. Konsultasi Perpajakan
 - b. Verifikasi
 - c. Bimbingan dan Pelatihan
 - d. *Tax Planning*
 - e. Restitusi
 - f. Keberatan Banding
 - g. Pelayanan Pelaporan Perpajakan

2. Akuntansi

Layanan akuntansi yang diberikan oleh Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan dirancang untuk membantu wajib pajak dalam memelihara pembukuan mereka sesuai dengan aturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sesuai dengan prosedur yang digunakan di Indonesia.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Audit Laporan Keuangan (*General Audit*)

Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan juga merupakan auditor independen dan dalam hal ini memiliki kemampuan untuk melakukan audit umum atas laporan keuangan dan hasil audit tersebut akan memberikan pernyataan pendapat (opini) berdasarkan kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. Audit Khusus (*Special Audit*)

Selain menangani Audit Laporan Keuangan, Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan juga menangani jasa Audit Khusus. Audit dilakukan dengan menggunakan prosedur audit yang disepakati bersama. Ini juga bisa menjadi audit informasi keuangan untuk tujuan tertentu dan audit khusus lainnya.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang

Tabel 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Perusahaan:	Kantor <u>Konsultan Pajak Cornel & Rekan</u>
Lokasi:	Jl. <u>Cempaka</u> , No. 146, 55283, <u>Perum</u> <u>Condongcatur</u> , Depok, Sleman, Yogyakarta
Periode Magang:	16 September 2022 – 5 <u>Desember</u> 2022
Sebagai:	<u>Staf Akuntan Pajak</u>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Aktivitas Magang

Penulis telah melaksanakan beberapa aktivitas selama magang. Aktivitas yang penulis lakukan diantaranya yaitu:

Melakukan Rekapitulasi Rekening Koran

Rekening Koran merupakan kumpulan semua transaksi-transaksi perusahaan baik alur debit maupun kredit. Rekening ini berisi aliran dana masuk dan keluar perusahaan dalam suatu masa tertentu. Rekening ini menjadi dasar pembukuan milik wajib pajak untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran melalui transaksi perbankan.

Jurnal Penjualan dengan Faktur Pajak

Jurnal penjualan termasuk ke dalam pembukuan. Jurnal penjualan yaitu memasukkan seluruh transaksi berdasarkan pada SPT Masa PPN perusahaan setiap bulannya.

Menginput Faktur Masukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Hampir sama dengan pekerjaan sebelumnya, namun kegiatan ini dilakukan dengan menginput data *file* dari dokumen fisik berupa faktur pajak masukan perusahaan.

Jurnal Pembelian Kredit dengan Faktur Pajak

Jurnal pembelian termasuk ke dalam pembukuan. Jurnal pembelian yaitu memasukkan seluruh transaksi berdasarkan pada SPT Masa PPN Orang Pribadi (OP) setiap bulannya.

Mengerjakan Jurnal Kas

Jurnal kas merupakan salah satu bagian kerja dari proses pembukuan yang dilakukan setelah klasifikasi biaya selesai. Jurnal kas berisi penelaahan biaya yang dikeluarkan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

setiap bulan dalam setahun. Jurnal kas mencatat dan meringkas total pengeluaran pelanggan untuk setiap tanggal setiap bulan dalam setahun.

Menginput SPT Masa Pajak

Memasukkan SPT masa merupakan bagian dari proses penyelesaian laporan keuangan wajib pajak, yang harus diisikan pada BBSR Jurnal Kas. Pengisian SPT ini meliputi SPT PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh final dan PPN tergantung penghasilan wajib pajak.

Mengerjakan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan dilakukan pada awal tahun setelah perusahaan tutup buku. Proses penyusunan laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, kompilasi aset, utang pajak, laporan perubahan ekuitas dan neraca. Pelaporan keuangan harus dilakukan dengan mengacu pada buku besar. Proses pembuatan laporan keuangan terbilang sangat sulit karena membutuhkan konsentrasi dan ketelitian dalam menanganinya.

Melaporkan SPT Masa PPN melalui e-faktur

Seperti diketahui, sebelum melaporkan e-faktur setiap bulan, Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mengunggah e-faktur pajak ke DJP untuk diverifikasi oleh DJP. Faktur pajak tidak akan dianggap sah kecuali disetujui atau diverifikasi oleh DJP. Namun, kini telah ditetapkan batas waktu untuk mengunggah e-faktur ke DJP. Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan setelah e-faktur dibuat yaitu paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi melalui e-bupot

Pekerjaan ini dilakukan seluruh SPT masa PPh Unifikasi (PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23) milik wajib pajak yang tersedia di Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan. Pekerjaan ini ada banyak langkah-langkah dalam melaporkan SPT masa PPh Unifikasi melalui resmi DJP (Direktorat Jenderal Pajak).

Menginput SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dengan e-form

Sebelum pelaporan, SPT Tahunan harus diisi. Sebagai acuan, input SPT tahunan membutuhkan buku besar dan laporan keuangan. Form 1771 digunakan untuk mengisi SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Dalam hal langkah-langkah yang terlibat dalam memasukkan SPT Tahunan.

Membuat Kode *e-billing*

Kode *billing* adalah kode pengenal yang diterbitkan oleh sistem *billing* DJP untuk jenis pembayaran atau penyetoran pajak tertentu. ID tagihan adalah nama lain untuk kode tagihan. Kode ini dihasilkan oleh fungsionalitas penagihan sistem dari aplikasi penagihan DJP.

Mengarsipkan Berbagai Macam Berkas Pajak di Ruang Penyimpanan

Setiap awal bulan, berkas SPT PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Final, dan PPN diarsipkan di Kantor Konsultan Pajak Cornel and Rekan. Konsultan Pajak Cornel and Rekan melakukan pengarsipan SPT secara berkala setelah semua berkas telah dibayar dan dilaporkan. Penulis dan rekan lain melakukan pengarsipan pajak massal bersama. Berkas SPT PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Final, dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PPN ditempatkan dalam map berdasarkan nama wajib pajak yang tercantum dalam SPT.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Agency theory dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik usaha (*principal*) dan KKP & Rekan (*agent*), sehingga keterkaitannya dengan bidang jasa dapat dijelaskan dengan menggunakan teori keagenan. *Agency theory* menjelaskan hubungan kontraktual dimana pihak pertama (*principal*) mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada pihak lain (*agent*) (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Jansen dan Meckling (1976) dalam (Ujiyantho & Agus Pramuka, 2007) teori agensi menjelaskan mengenai sebuah kontrak antara KKP KKP & Rekan (*agent*) dan pemilik usaha (*principal*). Di antara *principal* dan *agent*, pemerintah lebih menginginkan laporan dari pihak *agent* karena *agent* yang mengelola laporan keuangan dan pelaporan perpajakan perusahaan sehingga lebih mengetahui mengenai kondisi sesungguhnya perusahaan, sedangkan *principal* hanya sebagai pemilik perusahaan yang menerima laporan dari pihak Kantor Konsultan Pajak KKP & Rekan. Posisi wajib pajak sebagai prinsipal dan KKP KKP & Rekan menjadi agennya. Prinsipal menginstruksikan KKP KKP & Rekan untuk menghitung dan melaporkan pajak mereka sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban agen kepada prinsipal. Keputusan akan dibuat atas dasar akuntabilitas. Keputusan yang tidak selaras antara

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pihak prinsipal dengan agen akan memunculkan sebuah konflik keagenan. Prinsipal ingin laba perusahaannya besar tetapi jumlah pajak yang dibayarkannya sedikit, sedangkan posisi Agen berusaha untuk mencapai tujuan prinsipal dengan berpedoman pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Terlihat bahwa mereka tidak semuanya memiliki tujuan yang sama, namun keduanya berusaha untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kemakmuran. Wajib Pajak sebagai prinsipal melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada KKP Cornel & Rekan sebagai agen untuk menangani kewajiban perpajakan seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang oleh wajib pajak. Alur keagenan yang terbentuk dalam KKP Cornel berawal dari klien datang ke kantor lalu konsultasi awal dengan staf admin, dilanjutkan meeting bersama Direktur KKP Cornel untuk memutuskan apakah KKP Cornel dipakai hanya jasa konsultannya saja atau mengerjakan seluruh mekanisme pelaporan perpajakan. Setelah terbentuk keputusan, membuat surat perjanjian kontrak kerja sebagai bentuk tanggung jawab KKP Cornel kepada klien. Tanggung jawab KKP Cornel & Rekan adalah memberikan layanan seperti konsultasi pajak, perencanaan pajak, restitusi, penyusunan buku besar, laporan keuangan pajak, dan penghitungan pajak terutang hingga pelaporan wajib pajak terutang. Pelaksanaan *Self Assessment* terhadap wajib pajak untuk memahami perpajakan, karena pengetahuannya terbatas sehingga memerlukan jasa konsultan pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang memiliki kontribusi dan peran paling besar dalam kemajuan suatu negara. Pembayaran pajak bersifat wajib dan memaksa sebagai bentuk wujud partisipasi Wajib Pajak untuk pembangunan Negara. Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek kena pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang bersumber di Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, tanpa memandang namanya. dan bentuk. (UU, 2008)

Sesuai dengan konsep hukum perpajakan, membayar pajak tidak hanya kewajiban, tetapi juga hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam bentuk pembiayaan dan pembangunan nasional. Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan menurut undang-undang, tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran negara bagi rakyat. (UU, 2007)

Pengertian pajak menurut (Rochmat Soemitro) dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1). Menegaskan bahwa pajak adalah iuran kepada kas yang oleh undang-undang (yang dapat dipaksakan), tidak menerima jasa timbal (berlawanan), dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Masyarakat Indonesia tidak bisa lepas dari pajak, karena segala aspek kehidupan dikenai pajak seperti, Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beberapa jenis pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penghasilan di Indonesia antara lain PPh 21, PPh 23, PPh 25 dan PPh Final. Selain pajak penghasilan, ada juga pajak pertambahan nilai. PPN adalah pajak yang dipungut atas konsumsi barang dan jasa di dalam wilayah pabean (wilayah Indonesia). Daerah pabean adalah wilayah negara Republik Indonesia, termasuk daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta bagian tertentu dari zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang berlaku hukum kepabeanan. (UU, 2009)

Akuntansi

Akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak (*tax return*) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan/*tax compliance* (Niswonger et al., 1973). Akuntansi Perpajakan merupakan bagian akuntansi yang menekankan kepada penyusunan SPT (*tax return*) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Akuntansi Pajak merupakan sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi lengkap yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai landasan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya akuntansi pajak, WP dapat dengan mudah menyusun SPT.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis

Penulis menemui beberapa kendala pekerjaan saat melakukan kegiatan studi lapangan. Masalah yang dihadapi oleh penulis ditemukan dalam pekerjaan kantor konsultan pajak Cornel & Rekan dalam penyusunan laporan akhir. Beberapa permasalahan yang menghambat penulis dalam melaksanakan kegiatan studi lapangan, yaitu:

Masalah Teknis Pengerjaan

Dalam proses pelaksanaan kegiatan studi lapangan, penulis menemui beberapa kendala dalam proses pengerjaannya. Masalah yang dihadapi dalam melakukan pekerjaan adalah semua masalah dalam pengerjaan teknis. Sebagian besar pekerjaan di Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan menggunakan komputer dan jaringan internet kantor yang terhubung ke server.

Proses Pengerjaan Rekening Koran

Dalam proses melakukan kegiatan studi lapangan, penulis menemui kendala berupa arsip yang sedang diolah. Kendala yang dihadapi penulis dalam proses menerjemahkan laporan mutasi bank menggunakan *form file* nasabah adalah hasil cetakan terkadang kurang jelas atau ukuran huruf terlalu kecil, serta penulisan dan nilai nominal yang sebenarnya harus akurat.

Brankas Penyimpanan Dokumen yang Tidak Rapi

Selama pemeriksaan lapangan, penulis menemui permasalahan tidak rapinya penyimpanan SPT PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan SPT PPN. Penulis

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengalami masalah ketika mencoba menemukan folder wajib pajak yang akan diarsipkan dan dimasukkan ke dalam brankas penyimpanan. Karena brankas penyimpanan yang berantakan, sulit bagi penulis untuk menemukan folder wajib pajak yang bersangkutan.

Pembahasan

Saat penulis melakukan kegiatan studi lapangan, ditemukan beberapa permasalahan dalam kegiatan tersebut. Permasalahan yang dihadapi penulis pada saat studi lapangan di tempat kantor konsultan pajak Cornel & Rekan semua memiliki solusi dari permasalahan tersebut, sehingga semua tugas dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Solusi yang dapat penulis ambil untuk mengatasi permasalahan yang ada pada saat melakukan kegiatan kerja lapangan yaitu:

Memperbaiki dan Konsultasi kepada Mentor

Ketika dihadapkan pada kendala teknis dalam proses pengerjaan, penulis menemukan beberapa solusi dan saran untuk mengatasinya. Jika tidak berhasil, dan masih ada kesulitan, solusi lain adalah dengan meminta bantuan staf di Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan untuk membantu mengatasi kesulitan tersebut. Setelah penulis membuat pemecahan masalah teknis, langkah selanjutnya adalah membuat saran masalah teknis.

Konsultasi Pengerjaan Rekapitulasi Mutasi Rekening Koran

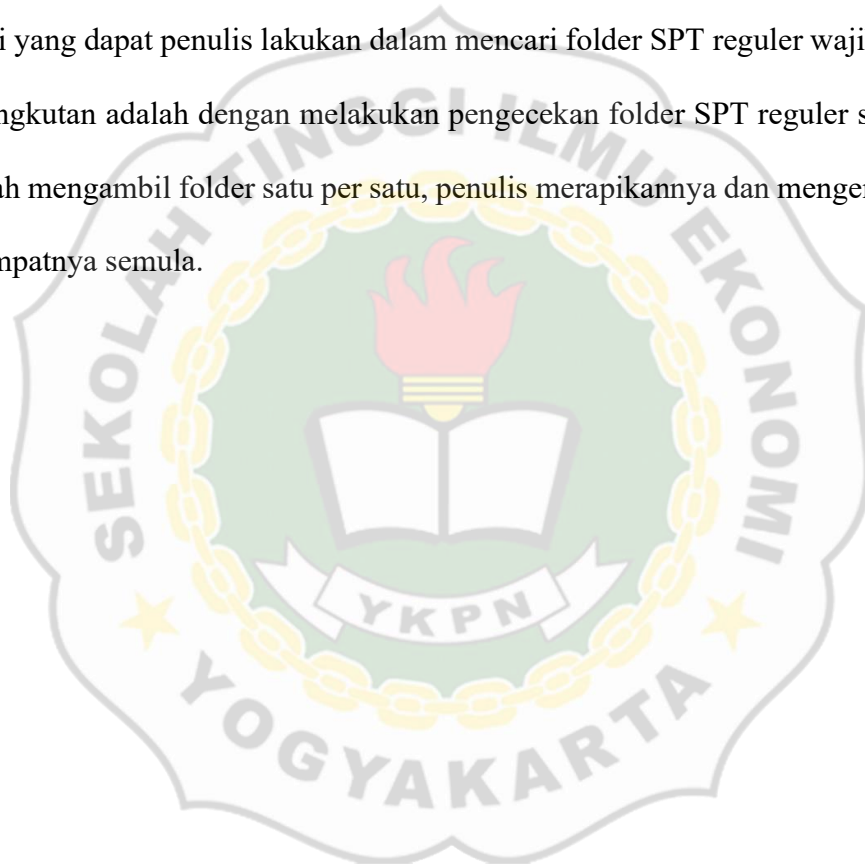
Akan sangat membantu untuk berkonsultasi dengan mentor penulis tentang kata dan nama yang tercantum dalam rekening giro yang sebenarnya. Saran yang bisa saya

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berikan adalah mengecek kembali settingan printer yang mencetak rekening koran, agar isi cetakan rekening koran yang dicetak bisa benar dan jelas.

Membuat Sistem Dalam Proses Pengarsipan di Brankas Penyimpanan

Solusi yang dapat penulis lakukan dalam mencari folder SPT reguler wajib pajak yang bersangkutan adalah dengan melakukan pengecekan folder SPT reguler satu per satu. Setelah mengambil folder satu per satu, penulis merapikannya dan mengembalikannya ke tempatnya semula.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN REFLEKSI DIRI

Kesimpulan

Studi lapangan yang dilakukan penulis merupakan cara penerapan program pembelajaran resmi pada kegiatan praktikum. Pekerjaan yang ditawarkan oleh Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan dapat memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis. Semua masalah yang termasuk dalam setiap pekerjaan memiliki solusi untuk masalah tersebut.

Berdasarkan program studi yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses melakukan rekapitulasi rekening koran, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat ditangani dengan baik dan benar. Berbagai transaksi, masalah rumus excel, kesalahan pengecekan saldo rekening, dan banyaknya nasabah yang mengajukan rekening terpisah merupakan masalah yang sering dijumpai dalam proses pengolahan.
2. Dalam proses melaporkan SPT Masa Pajak, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat ditangani dengan baik dan benar. Masalah seperti sulitnya mengakses website resmi DJP dan kurang jelasnya kode NTPN pada bukti pembayaran. Dalam hal ini, penulis mengatasi hal tersebut dengan berusaha untuk mencoba mengakses beberapa saat dengan memberi jeda untuk akses ke website DJP.
3. Penulis dapat menerapkan teori Aplikom, Akuntansi Pengantar, dan Perpajakan dalam aktivitas magang. Sehingga teori yang diperoleh di kampus dapat seimbang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dengan praktik di lapangan (Konsultan Pajak Cornel) sebagai bekal memasuki dunia kerja sesungguhnya.

4. Penulis mampu bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri maupun bekerja dalam tim. Selain itu, penulis menjadi lebih disiplin karena bertanggungjawab atas *deadline* pekerjaan yang diberikan.

Rekomendasi

Berdasarkan studi lapangan yang dilakukan, penulis dapat membuat rekomendasi untuk membuat studi lapangan Cornel & Rekan di masa mendatang menjadi lebih baik, beberapa saran ini meliputi:

1. Saya berharap tutor magang dapat memberikan bimbingan yang lebih baik tentang pekerjaan yang saya lakukan, sehingga penulis dapat secara mandiri mengatasi masalah yang dihadapi dalam pekerjaan saat melakukan kegiatan studi lapangan.
2. Staf harus memperlakukan mahasiswa studi lapangan secara adil dalam pemberian tugas.
3. Diharapkan staf dapat memberikan pengalaman kerja dengan memberikan kesempatan kerja yang lebih beragam bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan kerja lapangan.
4. Memperbaiki sistem pengarsipan berkas wajib pajak agar lebih rapi dan teratur, serta berkas yang disimpan tidak rusak atau hilang.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Refleksi Diri

Studi lapangan yang penulis tempuh selama menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara ini merupakan salah satu bentuk seleksi tugas akhir bagi mahasiswa yang merupakan syarat kelulusan dari STIE YKPN Yogyakarta. Alasan saya memilih Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan adalah karena saya ingin mempelajari dan memahami sistem perpajakan Indonesia lebih dalam dan memanfaatkan ilmu akuntansi yang saya pelajari dalam kegiatan perkuliahan di STIE YKPN Yogyakarta. Penulis mengetahui hal tersebut dari rekan yang telah menjalankan kegiatan studi lapangan di KKP Cornel & Rekan sebelumnya.

Dalam proses kegiatan studi lapangan, penulis sering menemui beberapa permasalahan yang penulis hadapi dalam menjalankan pekerjaannya. Permasalahan tersebut sering ditemui oleh penulis dalam melakukan kegiatan studi lapangan. Bagi penulis, persoalan-persoalan tersebut merupakan tantangan dalam pekerjaan, bagi penulis untuk mengembangkan keterampilan dan mengasah kemampuan berpikir untuk mengatasinya.

Dalam proses melakukan kegiatan studi lapangan, penulis telah melakukan banyak pekerjaan studi lapangan. Penulis merasa puas dan senang selama melakukan kegiatan studi lapangan. Ini merupakan hal baik yang telah penulis terapkan selama magang di Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi Pajak (ed.1)* - Google Books. Retrieved December 27, 2022, from [https://www.google.co.id/books/edition/Akuntansi_Pajak_ed_1/IiJhrbt3O4AC?hl=en&gbpv=1&dq=Waluyo,\(2008\),+Akuntansi+Pajak,+Jakarta:+Salemba+Empat.&pg=PR2&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Akuntansi_Pajak_ed_1/IiJhrbt3O4AC?hl=en&gbpv=1&dq=Waluyo,(2008),+Akuntansi+Pajak,+Jakarta:+Salemba+Empat.&pg=PR2&printsec=frontcover)
- Dasar-dasar hukum pajak pendapatan 1944 / Rochmat Soemitro | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. Retrieved November 20, 2022, from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=82420>
- Firmansyah, R. A., Keuangan, P., Stan, N., & Wijaya, S. (2022). Natura Dan Kenikmatan Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 343–359. <https://doi.org/10.31092/JPKN.V3I2.1645>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). dan Meckling, WH. 1976. Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. In *Jurnal of Financial Economics. Academy Management Review* (Vol. 20, Issue 2, pp. 82–137).
- Jokowi: Pembangunan IKN Butuh Rp 466 Triliun, 20 Persen Diambil dari APBN Halaman all - Kompas.com*. Retrieved October 30, 2022, from <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/08563911/jokowi-pembangunan-ikn-butuh-rp-466-triliun-20-persen-diambil-dari-apbn?page=all>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved October 30, 2022, from <https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu>
- Konsep Strategis di Era Disrupsi Digital*. Retrieved November 7, 2022, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15225/Konsep-Strategis-di-Era-Disrupsi-Digital.html>
- Niswonger, C. R. (Clifford R., Fess, P. E., & McKinsey, J. O. (1973). *Accounting principles*. 868.
- Nugraheni, A. P., & Sunaningsih, S. N. (2020). *Peran Konsultan Pajak Dalam Kepatuhan Pajak*. 4(1), 49–58.
- Nur Anggi Rahman, A., Agti Firdausa, A., Efhaes, ruf, & Keuangan Negara STAN, P. (2022). Intervensi Tarif Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Cipta Kerja: Analisis Implikasi Dan Strategi Pemulihan Ekonomi Kala Pandemi Covid-19. *Educoretax*, 2(1), 35–48. <https://doi.org/10.54957/EDUCORETAX.V2I1.151>
- Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat*. Retrieved October 30, 2022,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

from

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30590/t/UU+Ciptaker+Hadir+Untuk+Indonesia+lebih+Maju>

Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19. Retrieved October 31, 2022, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>

Ujiyantho, M. A., & Agus Pramuka, B. (2007). Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi X, Juli.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 | Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved November 3, 2022, from <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 | Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved November 3, 2022, from <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 | Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved November 3, 2022, from <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-42-tahun-2009>

